



LAPORAN MONEV  
RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA  
TRIWULAN I



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
Jalan Semila Jati II Dusun Tonja, Desa Gubung Kabupaten Tabanan  
TLP.(0361) 811171  
2025

## KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Monev Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Triwulan I Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dokumen ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Dokumen perencanaan ini memberikan gambaran perencanaan kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya dokumen ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga dokumen ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Startegis BPBD tahun 2021-2026

Tabanan, 8 April 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M  
Pembina Tk. I (IV/ b)  
NIP. 19740624 200604 1 010

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Tujuan .....	3
BAB II RENCANA AKSI.....	4
2.1 Sasaran Strategis .....	4
2.2 Arah Kebijakan .....	4
2.3 Program dan Kegiatan .....	5
2.4 Matrik Rencana Aksi .....	5
BAB III MONEV RENCANA AKSI.....	11
3.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	11
3.2 Evaluasi Hasil Rencana Aksi.....	13
BAB IV PENUTUP .....	15
4.1 Kesimpulan .....	15
4.2 Saran .....	15
LAMPIRAN	

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Pengendalian dan penagwasan hasil-hasil pembangunan sangatlah penting dalam tata kelola pemerintahan yang mengedepankan hasil yang berdampak kepada kemajuan pembangunan. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040 dan rumsuan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029, dimana dalam Rencana Penaggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 2011 dan dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2025 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*), 4) Penguatan sumber daya manusia kebencanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Peran birokrasi yang akuntabel dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana khususnya dalam manajemen bencana menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua *stakeholder*. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berAKHLAK.

Penyusunan rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencana harus didasari atas isu-isu strategis yang terus berkembang, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana strategis perangkat daerah. Oleh karena itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala melakukan pemutahiran rencana aksi penanggulangan bencana yang dikolaborasikan dengan rencana aksi penerapan SPM sub bencana.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan hukum penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah .
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- e. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46).
- f. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/386 /01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

## **1.3. Tujuan.**

- a. Memberikan informasi rencana aksi program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan tahun 2025.
- b. Memberikan informasi hasil monev rencana aksi program dan kegiatan penanggulangan bencana DI Kabupaten Tabanan.

## II. RENCANA AKSI

### 2.1 Sasaran Strategis

RPJMD Semesta Berencana menjadi acuan dalam perencanaan rencana aksi yang selaras dengan asta program. BPBD melaksanakan amanah :

- Misi pertama : Merwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan (Aman)
- Tujuan pertama : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan
- Sasaran pertama : Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Asta program ketujuh : pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dari tujuan terwujudnya Tabanan yang tangguh dalam menghadapi bencana dilanjutkan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah pengurangan risiko bencana.

Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
- b. Respon cepat terhadap penanganan bencana.
- c. Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja.

### 2.2 Matrik Rencana Aksi

Adapun rencana aksi program dan kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (dua) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 (satu) program penanggulangan bencana yang terdistribusi dalam 10 (sepuluh) kegiatan prioritas seperti berikut ini.

Tabel Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Kegiatan Prioritas	Rencana Aksi Kegiatan	Instansi
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Musrenbang	Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana	BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Kajian partisipatif	Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat	BPBD, Bappeda, Bakeuda

		Kajian teknokratik	Melakukan Focus Group Discussion dan Forum OPD	BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Kajian pokok-pokok pikiran dewan	Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran	BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setwan
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan	BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setda, BPS, Satpol PP
		Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah urusan wajib dasar bidang kebencanaan	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana	BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setda, BPS, Satpol PP, Camat
2	Administrasi keuangan PD			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium	Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium	Bakeuda BPBD Inspektorat
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan persediaan	Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan	Bakeuda BPBD Inspektorat
3	Administrasi umum PD			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor	Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor	Bakeuda, BPBD, rekanan
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor	Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kanto	Bakeuda, BPBD, rekanan
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan	Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan	Bakeuda, BPBD, rekanan
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Identifikasi dan pemenuhan penjilidan dan foo copy dokumen	Bakeuda, BPBD, rekanan
e	Penyediaan bahan material	Penyediaan bahan material kantor	Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer	Bakeuda, BPBD, rekanan
f	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti rakor luar daerah	Memenuhi undangan rakor instansi pusat	Bakeuda, BPBD, rekanan
g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	-	-	Tidak dapat anggaran
4	Penyediaan jasa penunjang urusan PD			
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan materai untuk dokumen PD	Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas	Bakeuda, BPBD, rekanan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, internet	Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas	Bakeuda, BPBD, rekanan
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN	Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan kinerja Non ASN	Bakeuda, BPBD, rekanan
5	Pengadaan BMD penunjang urusan PD			

a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	Tidak dapat anggaran
6	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD			
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional	Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil	Bakeuda, BPBD, rekanan
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan suku cadang alat kerja	Identifikasi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer	Bakeuda, BPBD, rekanan
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota			
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Sosialisasi mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparatur dan masyarakat	BNPB, BPBD Camat Babinsa Babinkabtribnas. Forum PRB
			KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana	BPBD, Forum PRB, Guru, Siswa
		Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana	Pemasangan peta, spanduk, baliho daerah rawan bencana	Aparat desa
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
a	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Penguatan desa tangguh bencana	FGD penguatan destana	BNPB, BPBD Camat Babinsa Babinkabtribnas
			Pembentukan relawan desa	BPBD, Babinsa, Babinkabtribnas
			Pengukuhan destana	BPBD, Perbekel
		Penguatan IKD dan IRB desa	Pendampingan instrument IKD dan IRBI desa	BPBD, Aparat desa, BPD
b	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana	FGD isu-isu strategis kebencanaan	BNPB, BPBD, Camat, TNI, Polri, Aparat Desa, FRB, RAPI, OPD lainnya
			Renkon tsunami, Renkon gempa bumi, Renkon banjir, Renkon cuaca ekstim, Renkon tanah longsor	BNPB, BPBD, Camat, TNI, Polri, Aparat Desa, FRB, RAPI, OPD lainnya
c	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan	BNPB, BPBD, PMI, SAR, Sekolah, Relawan
		Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana	FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana	BPBD, Forum PRB, guru, aparat desa
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan peralatan penanganan darurat	Penyediaan peralatan darurat bencana	BNPB, BPBD, TAPD, BUMN,

		bencana		Swasta
			Penyediaan peralatan pengungsi	BNPB, BPBD, TAPD, BUMN, Swasta
		Penyediaan logistik kebencanaan	Penyediaan logistik kebencanaan	BNPB, BPBD, TAPD, BUMN, Swasta
			Distribusi logistik kebencanaan	BPBD, TRC, relawan
		Penanganan bencana	Respon time kebencanaan	BNPB, BPBD, TRC, PMI, SAR, TNI, POLRI, Relawan
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
a	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Survey lokasi wilayah terdampak bencana	Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana	BPBD, OPD terkait, Aparat Desa, Pekaseh, Adat, dll
			Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana	BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi	Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana	BNPB, BPBD, Bakeuda, OPD terkait
			Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana	BNPB, BPBD, Bakeuda, OPD terkait

Rencana aksi tahun 2025 atas program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tersebut dijabarkan lebih terinci untuk memudahkan mengukur pencapaian kinerja di tahun perencanaan. Adapun rinciannya seperti berikut ini.

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Kegiatan Teknis	Rincian Kegiatan	Rencana Triwulanan			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Musrenbang	Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana	1 dok			
		Kajian partisipatif	Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat	1 dok			
		Kajian teknokratik	Melakukan Focus Group Discussion dan Forum OPD	1 dok	1 dok		
		Kajian pokok-pokok pikiran dewan	Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran	1 dok	1 dok		
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan	2 lapor			
		Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

		urusan wajib dasar bidang kebencanaan	administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana				
2	Administrasi keuangan PD						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium	Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan persediaan	Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
3	Administrasi umum PD						
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor	Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor	Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kantor	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan	Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Identifikasi dan pemenuhan penjilidan dan foto copy dokumen	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
e	Penyediaan bahan material	Penyediaan bahan material kantor	Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
f	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti rakor luar daerah	Memenuhi undangan rakor instansi pusat	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	Tata kelola arsip dinamis dan arsip tetap	Penataan arsip dinamis dan arsip tetap	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
4	Penyediaan jasa penunjang urusan PD						
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan materai untuk dokumen PD	Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, internet	Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN	Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian Non ASN	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
5	Pengadaan BMD penunjang urusan PD						
a	Pengadaan mebelair	Pengadaan mebelair	Pengadaan meja, kursi, almari		1 lapor		
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan alat kerja	Pengadaan alat kerja kantor		1 lapor		
6	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD						
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional	Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan suku cadang alat kerja	Identifikasi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

Rencana aksi teknis tahun 2025 dalam program penanggulangan bencana dirinci seperti berikut ini.

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Kegiatan Teknis	Rincian Kegiatan	Rencana Triwulanan			
				I	II	III	IV
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota						
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Sosialisasi mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparaturnya dan masyarakat	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
			KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana		1 lapor		
		Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana	Pemasangan peta, spanduk, baliho daerah rawan bencana	10 kec	10 kec		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
a	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Penguatan desa tangguh bencana	FGD penguatan destana			1 lapor	
			Pembentukan relawan desa			1 lapor	
			Penguatan destana				1 lapor
	Penguatan IKD dan IRB desa	Pendampingan instrument IKD dan IRB desa		1 lapor	1 lapor		
b	Pelatihan mitigasi bencana	Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM	Koordinasi dengan aparat desa rawan bencana	1 laporan			
		Pelatihan SDM masyarakat rawan bencana	Pelatihan administrasi dan teknis penguatan SDM rawan bencana			50 orang	
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana	FGD isu-isu strategis kebencanaan			1 lapor	
			Renkon banjir, Renkon cuaca ekstrem, Renkon tanah longsor			1 dok	
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan		1 lapor		
		Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana	FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana		1 lapor		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan peralatan penanganan darurat bencana	Penyediaan peralatan darurat bencana		1 jenis		
			Penyediaan peralatan pengungsi				1 jenis
		Penyediaan logistik kebencanaan	Penyediaan logistik kebencanaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Distribusi logistik kebencanaan	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec
Penanganan bencana	Respon time kebencanaan	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam		
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
a	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Survey lokasi wilayah terdampak bencana	Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec

	Kabupaten/Kota		Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
		Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi	Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
			Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

### III. MONEV RENCANA AKSI

#### 3.1 Monitoring Rencana Aksi

a. Monitoring Rencana Aksi pelayanan administrasi menunjang pelayan publik sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Kegiatan Teknis	Rincian Kegiatan	Target	Hasil Monitoring
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Musrenbang	Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana	1 dok	Tidak ada usulan prioritas musrenbangcam ke BPBD
		Kajian partisipatif	Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat	1 dok	Kajian program dan kegiatan prioritas
		Kajian teknokratik	Melakukan Focus Group Discussion dan Forum OPD	1 dok	BA Forum OPD
		Kajian pokok-pokok pikiran dewan	Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran	1 dok	Rapat perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, dan usulan anggaran 2026
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan	1 laporan	Laporan humas informasi bencana
		Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah urusan wajib dasar bidang kebencanaan	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana	1 laporan	Laporan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan public
2	Administrasi keuangan PD				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium	Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium	1 laporan	Laporan gaji dan tunjangan
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan persediaan	Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan	1 laporan	SPJF bulanan
3	Administrasi umum PD				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor	Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor	1 laporan	Tersedia peralatan listrik
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor	Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kantor	1 laporan	Tersedia alat kebersihan kantor
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan	Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan	1 laporan	Tersedia kelengkapan upacara keagamaan
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Identifikasi dan pemenuhan penjiilidan dan foto copy dokumen	1 laporan	Telah dicopy dokumen BPBD
e	Penyediaan bahan material	Penyediaan bahan material kantor	Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer	1 laporan	Tersedia ATK, kertas, tinta printer
f	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti rakor luar daerah	Memenuhi undangan rakor instansi pusat	1 laporan	Rakornas PB secara zoom
g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	Tata kelola arsip dinamis dan arsip tetap	Penataan arsip dinamis dan arsip tetap	1 laporan	Menerima sosialisasi tata cara pemusnahan arsip dari Dispersip

4	Penyediaan jasa penunjang urusan PD				
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan materai untuk dokumen PD	Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas	1 laporan	Tersedia materai
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, internet	Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas	1 laporan	Terbayar listrik, air, telepon
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN	Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian Non ASN	1 laporan	Terbayar jasa Non ASN
5	Pengadaan BMD penunjang urusan PD				
a	Peengadaan mebelair	Penagdaan mebelair	Pengadaan meja, kursi, almari	1 laporan	Masih diusulkan ke TAPD
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan alat kerja	Pengadaan alat kerja kantor	1 laporan	Proses administrasi
6	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD				
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional	Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil	1 laporan	Tersedia BBM
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan suku cadang alat kerja	Identifiaksi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer	1 laporan	Servis laptop

Sumber : PPTK, 2025

b. Monitoring Rencana Aksi pelayanan kebencanaan menunjang pelayan publik sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Kegiatan Teknis	Rincian Kegiatan	Target	Hasil Monitoring
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Sosialisasi mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparat dan masyarakat	1 laporan	Terlaksana KIE bagi 133 perwakilan aparat desa secara tatap muka
			KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana	1 laporan	Sudah diadakan SPAB di SPM 3 Penebel dan SMP 2 Baturiti
		Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana	Pemasangan peta, spanduk, baliho daeah rawan bencana	10 kec	Tidak mendapat anggaran
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana				
a	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Penguatan desa tangguh bencana	FGD penguatan destana	1 laporan	Direncanakan Triwulan IV
			Pembentukan relawan desa	1 laporan	Direncanakan Triwulan IV
			Penguatan destana	1 laporan	Direncanakan Triwulan IV
		Penguatan IKD dan IRB desa	Pendampingan instrument IKD dan IRB desa	1 laporan	Direncanakan Triwulan IV
b	Pelatihan mitigasi bencana	Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM	Koordinasi dengan aparat desa rawan bencana	1 laporan	Koordinasi dengan calon Destana Selabih
		Pelatihan SDM masyarakat rawan bencana	Pelatihan admiistrasi dan teknis penguatan SDM rawan bencana	1 laporan	Direncanakan Triwulan II
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana	FGD isu-isu strategis kebencanaan	1 laporan	Direncanakan Triwulan II
			Renkon banjir, Renkon cuaca ekstim, Renkon tanah longsor	1 laporan	Direncanakan Triwulan III

d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan	1 laporan	Direncanakan Triwulan II
		Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana	FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 laporan	Direncanakan Triwulan II
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan peralatan penanganan darurat bencana	Penyediaan peralatan darurat bencana	1 laporan	Direncanakan Triwulan II
			Penyediaan peralatan pengungsi	1 laporan	Tidak mendapat anggaran
		Penyediaan logistik kebencanaan	Penyediaan logistik kebencanaan	1 paket	Tidak mendapat anggaran
			Distribusi logistik kebencanaan	10 kec	3 lokasi
		Penanganan bencana	Respon time kebencanaan	24 jam	TRC dan Saatgas
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
a	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Survey lokasi wilayah terdampak bencana	Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana	10 kec	Survey oleh Tim Jitupasna
			Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana	1 laporan	Pengolahan data oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
		Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi	Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana	1 laporan	Rapat koordiansi ke BPBD Provinsi
			Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana	1 laporan	Direncanakan Triwulan IV

Sumber : PPTK, 2025

### 3.2 Evaluasi Rencana Aksi

Periode Januari sd Maret 2025 dari hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi penanggulangan bencana dapat dievaluasi sebagai berikut :

#### a. Evaluasi Renaksi pada Prabencana

- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah melaksanakan pelayanan pencegahan melalui sosialisasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana kepada pemangku kepentingan (aparatur di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa) dan masyarakat umum. Pelayanan kesiapsiagaan masih dirancang untuk gladi kesiapsiagaan di tanggal 26 April 2025.
- Tidak semua kegiatan mendapat dukungan anggaran namun dapat dilakukan dengan kesiapan aparatur sesuai tufoksinya.

#### b. Evaluasi Renaksi pada Tanggap Bencana

- Bidang Kedaruratan dan Logistik telah melaksanakan pelayanan kedaruratan/ tanggap bencana didukung oleh Fungsional Umum dan TRC melayani 75 titik kejadian bencana dengan 24.7. Pemberian bantuan logistik di 3 titik bencana kepada masyarakat sesuai kemampuan daerah.

- Tidak semua kegiatan mendapat dukungan anggaran namun dapat dilakukan dengan kesigapan aparatur sesuai tufoksinya

c. Evaluasi Renaksi pada Pascabencana

- Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi telah melaksanakan pelayanan survey dan kaji cepat kebutuhan pulih lebih cepat pada masyarakat terdampak bencana didukung oleh Tim Jitupasna melayani 97 titik kejadian bencana. Hasil kaji cepat kebutuhan untuk rekontruksi diajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk dipertimbangkan bantuannya sesuai kemampuan daerah.
- Tidak semua kegiatan mendapat dukungan anggaran namun dapat dilakukan dengan kesigapan aparatur sesuai tufoksinya

d. Evaluasi Renaksi pada Administrasi Layanan

- Sekretariat telah melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai SOP dan SP dengan keterbatasan aparatur (belum ada JF Analis Bencana, JF Penata Penanggulangan Bencana, dan JF Perencana) begitu juga keterbatasan aparatur pelaksana atau fungsional umum sehingga banyak fungsional umum mendapat tugas ganda atau berlebih. Fungsional Umum di Sekretariat ada 4 orang, di Bidang PK ada 1 orang, di Bidang KL ada 0 orang, dan di Bidang RR ada 2 orang.
- Tidak semua kegiatan mendapat dukungan anggaran namun dapat dilakukan sesuai skala prioritas dengan kesigapan aparatur sesuai tufoksinya.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan rencana aksi untuk menjabarkan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan rencana aksi daerah yang telah diselaraskan dengan perencanaan kinerja yaitu :

- a. Rencana aksi pada prabencana melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas dengan 12 rencana aksi dan sudah terlaksana di 3 renaksi
- b. Rencana aksi pada tanggap bencana melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas dengan 5 rencana aksi dan sudah terlaksana di 2 renaksi
- c. Rencana aksi pada pasca bencana melalui 2 (dua) kegiatan prioritas dengan 4 rencana aksi dan sudah terlaksana di 2 renaksi.
- d. Rencana aksi pada penunjang urusan pemerintahan melalui 22 (dua puluh dua) kegiatan prioritas dengan 22 rencana aksi dan sudah terlaksana 20 renaksi.

### 4.2 Saran dan Langkah Antisipatif

Rencana aksi penanggulangan bencana baik di pelayanan kantor, prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana akan dapat terlaksana dengan baik dan terukur apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan anggaran.

Langkah antisipatif yang diajukan untuk penguatan kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana adalah kolaborasi semua *pentahelik* untuk menurunkan tingkat kerawanan dan bencana serta meningkatkan kapasitas daerah.

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M  
Pembina Tk. I (IV/ b)  
NIP. 19740624 200604 1 010

## Lampiran

## RENCANA AKSI KINERJA DAN ANGGARAN DI BPBD TAHUN 2025

## a. TUJUAN STRATEGIS

No	Tujuan Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja			Anggaran (Rp)			Penanggung jawab	
				Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan		Target
1	Tabanan tanggung dimulai dari desa	Indeks Risiko Bencana	-	144.47	Januari		Penanggulangan bencana	6.308.411.200	Januari	518.068.469	Bid PK, KL, RR, Sekretariat
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	%	85	Pebruari				Pebruari	492.742.139	
					Maret		Maret	734.470.585			
					April		April	586.950.039			
					Mei		Mei	574.323.839			
					Juni		Juni	723.229.585			
					Juli		Juli	542.669.939			
					Agustus		Agustus	425.568.739			
					September		September	423.022.639			
					Oktober		Oktober	472.184.239			
					Nopember		Nopember	413.941.040			
					Desember	144.47	Desember	401.239.948			

## B. SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja			Anggaran (Rp)			Penanggung jawab	
				Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan		Target
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	%	100.00	Januari	100.00	Penanggulangan bencana	6.308.411.200	Januari	518.068.469	Bid PK,
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKJIP perangkat daerah	A	81	Pebruari	100.00			Pebruari	492.742.139	Bid KL,
					Maret	100.00	Maret	734.470.585	Bid RR		
					April	100.00	April	586.950.039	Sekret		
					Mei	100.00	Mei	574.323.839			
					Juni	100.00	Juni	723.229.585			
					Juli	100.00	Juli	542.669.939			
					Agustus	100.00	Agustus	425.568.739			
					September	100.00	September	423.022.639			
					Oktober	100.00	Oktober	472.184.239			
					Nopember	100.00	Nopember	413.941.040			
					Desember	100.00	Desember	401.239.948			

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tabanan



Nyoman Srinadha Giri, S.E  
Pembina Tk. I (IV/ b)  
NIP. 19740624 200604 1 010



